

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

4.1 Diskripsi Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data runtut waktu atau *time series* dan data *cross section*. Variable yang digunakan yaitu variable independen yang terdiri dari Upah Minimum Kabupaten (UMK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Jumlah Penduduk (JP), dan Angka Melek Huruf (AMH) sedangkan variable dependennya sendiri adalah persentase jumlah kemiskinan Provinsi Jawa Tengah.

Alat bantu yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini berupa alat bantu *Eviews 8 (eviews)*. Penelitian ini menggunakan analisis secara ekonometrik.

4.1.1 Perkembangan Upah Minimum

Upah merupakan imbal balik yang diterima pekerja atas apa yang dilakukan kepada pengusaha. Upah minimum merupakan upah yang ditetapkan secara minimum Regional, Sektoral Regional maupun Sub Sektoral (Sumarsono, 2003). Dalam penetapan upah minimum, didasarkan pada tingkat Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 upah minimum Kabupaten Provinsi Jawa Tengah selalu mengalami

kenaikan setiap tahunnya. Dengan adanya peningkatan upah minimum tersebut diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Pada periode 2011 hingga 2015 upah minimum Kabupaten tertinggi terdapat di Kota Semarang, upah minimum tersebut mencapai Rp. 1.685.000, ini dikarenakan Kota Semarang merupakan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dimana wilayah tersebut memiliki biaya hidup yang tinggi. Sedangkan untuk tingkat upah minimum terendah pada tahun 2015 terdapat pada Kabupaten Banyumas yaitu sebesar Rp. 1.100.000.



Tabel 4.1
Upah Minimum Kabupaten Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2011-2015

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
Kabupaten Cilacap	718666.67	773000.00	887667.00	1125000.00	1195666.97
Kabupaten Banyumas	750000.00	795000.00	877500.00	1000000.00	1100000.00
Kabupaten Purbalingga	765000.00	818500.00	896500.00	1023000.00	1101600.00
Kabupaten Banjarnegara	730000.00	765000.00	835000.00	920000.00	1112500.00
Kabupaten Kebumen	727500.00	770000.00	835000.00	975000.00	1157500.00
Kabupaten Purworejo	755000.00	809000.00	849000.00	910000.00	1165000.00
Kabupaten Wonosobo	775000.00	825000.00	880000.00	990000.00	1166000.00
Kabupaten Magelang	802500.00	870000.00	942000.00	1152000.00	1255000.00
Kabupaten Boyolali	800500.00	836000.00	895000.00	1116000.00	1197800.00
Kabupaten Klaten	766022.00	812000.00	871500.00	1026600.00	1170000.00
Kabupaten Sukoharjo	790500.00	843000.00	902000.00	1150000.00	1223000.00
Kabupaten Wonogiri	730000.00	775000.00	830000.00	954000.00	1101000.00
Kabupaten Karanganyar	801500.00	846000.00	896500.00	1060000.00	1226000.00
Kabupaten Sragen	760000.00	810000.00	864000.00	960000.00	1105000.00
Kabupaten Grobogan	735000.00	785000.00	842000.00	935000.00	1160000.00
Kabupaten Blora	816200.00	855500.00	932000.00	1009000.00	1180000.00
Kabupaten Rembang	757600.00	816000.00	896000.00	985000.00	1120000.00
Kabupaten Pati	769550.00	837500.00	927600.00	1013027.00	1176500.00
Kabupaten Kudus	840000.00	889000.00	990000.00	1150000.00	1380000.00
Kabupaten Jepara	758000.00	800000.00	875000.00	1000000.00	1150000.00
Kabupaten Demak	847987.00	893000.00	995000.00	1280000.00	1535000.00
Kabupaten Semarang	880000.00	941600.00	1051000.00	1208200.00	1419000.00
Kabupaten Temanggung	779000.00	866000.00	940000.00	1050000.00	1178000.00
Kabupaten Kendal	843750.00	893000.00	953100.00	1206000.00	1383450.00
Kabupaten Batang	805000.00	880000.00	970000.00	1146000.00	1270000.00
Kabupaten Pekalongan	810000.00	873000.00	962000.00	1145000.00	1271000.00
Kabupaten Pemalang	725000.00	793000.00	908000.00	1066000.00	1193400.00
Kabupaten Tegal	725000.00	795000.00	850000.00	1000000.00	1155000.00
Kabupaten Brebes	717000.00	775000.00	859000.00	1000000.00	1166550.00
Kota Magelang	795000.00	837000.00	901500.00	1037000.00	1211000.00
Kota Surakarta	826252.00	864450.00	915900.00	1145000.00	1222400.00
Kota Salatiga	843469.00	901396.00	974000.00	1170000.00	1287000.00
Kota Semarang	961323.00	991500.00	1209100.00	1423500.00	1685000.00
Kota Pekalongan	810000.00	895500.00	980000.00	1165000.00	1291000.00
Kota Tegal	735000.00	795000.00	860000.00	1044000.00	1206000.00

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

4.1.2 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran merupakan merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya (Sukirno, 2011).

Menurut BPS Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dihitung dari perbandingan antara banyaknya jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka menggambarkan ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan pekerjaan dan penduduk yang berusaha mendapatkan pekerjaan, dimana ketersediaan lapangan pekerjaan lebih kecil dari pencari kerja sehingga tidak mampu menampung pencari kerja. Perkembangan TPT di Jawa Tengah selama periode 2013-2015 terus menurun dari 6,01% turun 5,68% dan turun lagi menjadi 4,99%, artinya pada periode tersebut bertambah sekitar 1 orang dari 100 orang angkatan kerja yang baru memperoleh pekerjaan, namun meskipun pengangguran terus menurun, bukan berarti persoalan ketenagakerjaan sudah teratasi. Masih harus diteliti lebih lanjut, mereka yang sudah bekerja apakah sudah memiliki produktivitas yang tinggi atau tidak (BPS Jawa Tengah, 2015).

Tabel 4.2
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2011-2015

Kabupaten / Kota	2011	2012	2013	2014	2015
Kabupaten Cilacap	7.07	5.61	6.01	5.68	4.99
Kabupaten Banyumas	10.82	7.29	6.68	5.65	8.01
Kabupaten Purbalingga	6.61	5.11	5.45	5.37	6.37
Kabupaten Banjarnegara	5.1	5.02	5.63	5.13	4.84
Kabupaten Kebumen	4.97	3.69	4.16	4.06	5.05
Kabupaten Purworejo	4.73	3.58	3.52	3.25	4.14
Kabupaten Wonosobo	5.30	3.20	5.15	5.10	4.01
Kabupaten Magelang	4.92	5.21	5.82	5.34	4.47
Kabupaten Boyolali	6.83	4.38	6.13	7.45	5.16
Kabupaten Klaten	5.81	4.43	5.44	4.95	2.03
Kabupaten Sukoharjo	7.63	3.70	5.34	4.75	2.51
Kabupaten Wonogiri	6.27	6.1	5.98	4.60	4.52
Kabupaten Karanganyar	3.82	3.46	3.61	3.45	3.07
Kabupaten Sragen	5.78	5.82	3.84	3.54	3.60
Kabupaten Grobogan	8.43	5.88	5.63	6.04	4.51
Kabupaten Blora	5.33	4.20	6.10	4.25	5.22
Kabupaten Rembang	6.90	4.75	6.23	4.30	4.68
Kabupaten Pati	7.22	5.75	5.97	5.23	4.51
Kabupaten Kudus	11.17	11.98	7.29	6.37	4.43
Kabupaten Jepara	8.32	5.89	8.07	5.03	5.04
Kabupaten Demak	5.48	4.29	6.34	5.09	3.12
Kabupaten Semarang	5.03	8.4	7.08	5.17	6.02
Kabupaten Temanggung	6.16	4.87	3.9	4.38	2.57
Kabupaten Kendal	3.54	3.39	4.87	3.19	1.50
Kabupaten Batang	6.54	6.31	6.43	6.15	7.07
Kabupaten Pekalongan	6.66	5.88	7.02	7.42	4.56
Kabupaten Pemalang	6.91	5.08	4.78	6.03	5.10
Kabupaten Tegal	7.37	4.85	6.48	7.44	6.53
Kabupaten Brebes	10.59	6.12	6.89	8.47	9.52
Kota Magelang	11.08	8.22	9.61	9.53	6.49
Kota Surakarta	11.51	8.99	6.75	7.38	6.43
Kota Salatiga	7.70	6.29	7.22	6.16	4.53
Kota Semarang	9.02	6.84	6.21	4.46	6.43
Kota Pekalongan	7.65	6.01	6.02	7.76	5.77
Kota Tegal	8.06	7.67	5.28	5.42	4.10

Sumber : BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat Jawa Tengah 2015

4.1.3 Perkembangan Jumlah Penduduk

Memperhatikan laju pertumbuhan penduduk pertahun periode 2011-2015 maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah patut berbangga karena data penambahan penduduknya mengalami penurunan pertahun. Tahun 2011 penduduk Jawa Tengah bertambah 281.492 jiwa dibanding tahun sebelumnya, tahun 2012 pertambahannya menyusut hanya sebanyak 273.314 jiwa, terus menyusut sampai dengan tahun 2015 hanya bertambah 251.478 jiwa. Dilihat berdasarkan kabupaten/kota pada periode 2014-2015, sebanyak 16 kabupaten/kota laju pertumbuhan penduduknya berada di atas laju pertumbuhan penduduk provinsi. Sementara itu, 19 kabupaten/kota laju pertumbuhan penduduk di bawah angka provinsi. Mengamati pertumbuhan penduduk di tingkat kabupaten/kota, terlihat Kota Semarang memiliki laju pertumbuhan penduduk tertinggi se Jawa Tengah sebesar 1,68 persen, diikuti Kabupaten Jepara 1,50 persen dan Kota Salatiga 1,38 persen. Kabupaten/kota dengan dengan laju pertumbuhan penduduk terendah yaitu Kota Magelang 0,29 persen, selanjutnya dengan laju pertumbuhan sekitar 0,34 persen yaitu Kabupaten Purworejo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Pemalang, berikutnya Kabupaten Wonogiri sebesar 0,35 persen (BPS, Jawa Tengah 2015).

Tabel 4.3**Jumlah Penduduk (jiwa) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015**

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
Kabupaten Cilacap	1651940.00	1643555.00	1676089.00	1685573.00	1694000.00
Kabupaten Banyumas	1570598.00	1568398.00	1605579.00	1620918.00	1635000.00
Kabupaten Purbalingga	858798.00	858474.00	879880.00	889214.00	898000.00
Kabupaten Banjarnegara	875214.00	871955.00	889921.00	895986.00	901000.00
Kabupaten Kebumen	1162294.00	1157342.00	1176722.00	1181006.00	1185000.00
Kabupaten Purworejo	696141.00	693168.00	705483.00	708038.00	710000.00
Kabupaten Wonosobo	758993.00	754802.00	769318.00	773280.00	777000.00
Kabupaten Magelang	1194353.00	1193005.00	1221681.00	1233695.00	1245000.00
Kabupaten Boyolali	936822.00	932651.00	951817.00	957857.00	963000.00
Kabupaten Klaten	1135201.00	1128137.00	1148994.00	1154040.00	1158000.00
Kabupaten Sukoharjo	832094.00	840718.00	849506.00	856937.00	864000.00
Kabupaten Wonogiri	929870.00	925890.00	942377.00	945817.00	949000.00
Kabupaten Karanganyar	821694.00	820939.00	840171.00	848255.00	856000.00
Kabupaten Sragen	861939.00	856318.00	871989.00	875600.00	879000.00
Kabupaten Grobogan	1316693.00	1310217.00	1336304.00	1343960.00	1351000.00
Kabupaten Blora	833786.00	828783.00	844444.00	848369.00	852000.00
Kabupaten Rembang	596801.00	595376.00	608903.00	614087.00	619000.00
Kabupaten Pati	1198935.00	1193593.00	1218016.00	1225594.00	1232000.00
Kabupaten Kudus	788264.00	791018.00	810810.00	821136.00	830000.00
Kabupaten Jepara	1115688.00	1120339.00	1153213.00	1170797.00	1187000.00
Kabupaten Demak	1067993.00	1067776.00	1094472.00	1106328.00	1117000.00
Kabupaten Semarang	944877.00	947512.00	974092.00	987557.00	1000000.00
Kabupaten Temanggung	715907.00	714921.00	731911.00	738915.00	745000.00
Kabupaten Kendal	908533.00	906292.00	926812.00	934643.00	942000.00
Kabupaten Batang	713942.00	713226.00	729616.00	736397.00	743000.00
Kabupaten Pekalongan	845471.00	843211.00	861082.00	867573.00	873000.00
Kabupaten Pemalang	1264535.00	1257535.00	1279596.00	1284236.00	1288000.00
Kabupaten Tegal	1399789.00	1390571.00	1415009.00	1420132.00	1424000.00
Kabupaten Brebes	1742528.00	1732751.00	1764648.00	1773379.00	1781000.00
Kota Magelang	118606.00	117919.00	119935.00	120373.00	121000.00
Kota Surakarta	501650.00	498563.00	507825.00	510077.00	512000.00
Kota Salatiga	173056.00	173635.00	178594.00	181193.00	184000.00
Kota Semarang	1585417.00	1599702.00	1644800.00	1672999.00	1699000.00
Kota Pekalongan	284413.00	284068.00	290870.00	293704.00	296000.00
Kota Tegal	240777.00	239428.00	243860.00	244998.00	246000.00

Sumber : Sumber : BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat Jawa Tengah 2015

4.1.4 Perkembangan Angka Melek Huruf

Tabel 4.4

Angka Melek Huruf Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
Kabupaten Cilacap	91.48	91.49	91.97	92.65	93.06
Kabupaten Banyumas	94.06	94.24	94.77	94.78	96.29
Kabupaten Purbalingga	93.50	93.52	93.78	95.77	95.32
Kabupaten Banjarnegara	88.48	88.49	89.02	93.44	95.10
Kabupaten Kebumen	91.53	91.54	91.78	91.85	94.33
Kabupaten Purworejo	91.74	92.79	93.53	94.98	94.21
Kabupaten Wonosobo	91.16	91.43	92.30	95.75	95.08
Kabupaten Magelang	93.29	93.31	93.64	92.89	95.26
Kabupaten Boyolali	87.96	87.97	88.12	88.46	91.50
Kabupaten Klaten	89.92	89.93	90.01	92.44	91.80
Kabupaten Sukoharjo	90.72	90.73	91.36	92.17	92.62
Kabupaten Wonogiri	83.50	84.32	84.60	85.94	87.12
Kabupaten Karanganyar	88.90	88.95	90.32	93.15	91.04
Kabupaten Sragen	84.41	84.41	84.49	87.25	82.42
Kabupaten Grobogan	90.41	90.94	91.78	94.90	92.90
Kabupaten Blora	85.06	85.06	85.46	89.42	86.97
Kabupaten Rembang	91.36	91.37	92.07	91.31	93.81
Kabupaten Pati	87.59	87.61	89.56	92.11	91.00
Kabupaten Kudus	93.73	93.74	94.16	95.49	94.32
Kabupaten Jepara	93.15	93.29	94.26	94.91	94.46
Kabupaten Demak	92.53	92.54	93.09	94.60	94.96
Kabupaten Semarang	93.67	94.20	94.59	94.83	95.13
Kabupaten Temanggung	95.96	95.97	95.99	92.35	95.99
Kabupaten Kendal	89.31	89.77	90.23	91.50	93.40
Kabupaten Batang	89.90	89.93	90.67	94.37	93.10
Kabupaten Pekalongan	92.08	92.11	93.42	96.17	93.71
Kabupaten Pemasang	90.79	90.80	91.09	89.58	92.10
Kabupaten Tegal	89.47	90.64	91.03	94.48	92.23
Kabupaten Brebes	86.15	86.69	87.68	88.51	89.01
Kota Magelang	97.29	97.52	98.11	96.78	98.01
Kota Surakarta	96.71	96.73	96.87	97.62	97.39
Kota Salatiga	96.52	96.55	96.73	95.41	98.30
Kota Semarang	96.47	96.98	97.72	97.54	97.85
Kota Pekalongan	95.93	95.94	96.24	98.26	97.69
Kota Tegal	94.90	94.91	94.92	93.61	94.75

Sumber: BPS, Susenas

Berdasarkan data BPS tahun 2011- 2015 angka melek huruf menunjukkan kenaikan, ini menunjukkan bahwa angka buta aksara di Provinsi Jawa Tengah semakin menunjukkan penurunan. Semakin naik angka melek huruf menandakan semakin baik pula kualitas sumber daya manusia. Apabila kualitas sumber daya manusia semakin meningkat maka akan memperbesar kesempatan kerja yang nantinya akan berdampak pada pengurangan angka pengangguran yang berakibat pada penurunan angka kemiskinan. Angka melek huruf tertinggi ditahun 2015 terdapat di Kota Salatiga yaitu sebesar 98,30% dan Kabupaten dengan angka melek huruf terendah terdapat di Kabupaten Sragen dengan besar angka melek huruf 82,42 %.

4.2 Hasil dan Analisis

4.2.1 Hasil Pengujian Model Data Panel

1. Uji F- Statistik

Uji ini digunakan untuk memilih model yang akan digunakan antara model estimasi *common effect* atau model estimasi *fixed effect*, dengan uji hipotesis :

- a. H_0 : Memilih menggunakan model estimasi *common effect*, jika nilai probabilitas F-statistiknya tidak signifikan pada $\alpha = 5\%$
- b. H_1 : memilih menggunakan model estimasi *fixed effect*, jika nilai probabilitas F-Statistiknya signifikan pada $\alpha = 5\%$

Uji ini menggunakan distribusi probabilitas F statistik, apabila nilai probabilitas F statistic lebih besar daripada nilai alfa (α) maka model yang

digunakan adalah model estimasi *Common Effect*, sebaliknya apabila nilai probabilitas F statistik lebih kecil daripada nilai α maka model yang digunakan adalah model estimasi *Fixed Effect*.

Nilai probabilitas F statistik dari perhitungan menggunakan *eviews 8* adalah sebesar 0.0000 (kurang dari 5%), sehingga secara statistik H_0 ditolak dan menerima H_1 , maka model yang tepat digunakan adalah model estimasi *Fixed Effect*.

Tabel 4.5
Hasil Uji Signifikansi *Fixed Effect*

Redundant Fixed Effects Tests
Pool: PANEL
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	205.055080	(34,136)	0.0000
Cross-section Chi-square	692.353094	34	0.0000

Sumber : Data olahan *eviews 8*

2. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih model yang akan digunakan antara model estimasi *fixed effect* atau model estimasi *random effect* dengan uji hipotesis :

- H_0 : memilih menggunakan *random effect*, jika nilai probabilitas *Chi Square statistic* tidak signifikan pada $\alpha = 5\%$
- H_1 : memilih menggunakan model estimasi *fixed effect*, jika nilai probabilitas *Chi Square statistic* signifikan pada $\alpha = 5\%$

Uji Hausman ini menggunakan distribusi probabilitas statistic *Chi Square*, bila nilai probabilitas statistic *Chi Square* lebih besar dari pada nilai alfa (α), maka model yang digunakan adalah model estimasi *random effect*, sebaliknya bila nilai probabilitas statistic *Chi Square* lebih kecil dari pada alfa (α), maka nilai yang digunakan adalah model estimasi *fixed effect*

Nilai distribusi statistic *chi-square* dari perhitungan menggunakan eviews 8 adalah sebesar 15.435453 dengan probabilitas 0.0039 (lebih kecil dari $\alpha = 5\%$), sehingga secara statistic H_0 ditolak dan menerima H_1 , maka model yang tepat digunakan adalah model estimasi *Fixed Effect* (Tabel 4.6)

Tabel 4.6

Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: PANEL
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	15.435453	4	0.0039

Sumber : Data olahan eviews 8

4.2.2 Hasil Pengujian Statistik

Berdasarkan uji spesifikasi model yang telah dilakukan dengan menggunakan analisis uji chow dan hausman. Keduanya menunjukkan hasil menggunakan *fixed effect* model, maka model yang digunakan untuk mengestimasi factor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah adalah dengan menggunakan *fixed effect* model.

Berdasarkan model yang digunakan dalam penelitian ini (*fixed effect*)
 maka diperoleh hasil analisis estimasi data panel sebagai berikut :

Tabel 4.7

Hasil Estimasi *Fixed Effect*

Dependent Variable: POV
 Method: Panel Least Squares
 Date: 01/11/17 Time: 08:12
 Sample: 2011 2015
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 175

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	139.3187	80.72237	1.725899	0.0866
LOG(UMK)	-3.913310	0.650817	-6.012922	0.0000
TPT	0.105795	0.042084	2.513903	0.0131
LOG(JP)	-4.598468	6.471115	-0.710615	0.4785
AMH	-0.102019	0.045117	-2.261179	0.0253

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.987330	Mean dependent var	13.98575
Adjusted R-squared	0.983789	S.D. dependent var	4.554672
S.E. of regression	0.579905	Akaike info criterion	1.941677
Sum squared resid	45.73536	Schwarz criterion	2.646972
Log likelihood	-130.8968	Hannan-Quinn criter.	2.227765
F-statistic	278.8873	Durbin-Watson stat	1.475894
Prob(F-statistic)	0.000000		

Dari estimasi fixed effect pada Tabel 4.7 dapat diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut :

$$POV = 139.3187 - 3.913310 \text{ LogUMK} + 0.105795 \text{ TPT} - 4.598468 \text{ LogJP} - 0.102019 \text{ AMH} + e$$

Dimana:

POV = Persentase Jumlah Penduduk Miskin

UMK = Upah Minimum Kabupaten/Kota Jawa Tengah

TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Tengah

JP = Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah

AMH = Angka Melek Huruf Provinsi Jawa Tengah

4.2.2.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) adalah sesuatu yang menunjukkan seberapa besar variasi variable dependen POV dapat dijelaskan oleh variable-variabel independen UMK, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), jumlah penduduk, dan jumlah Angka Melek Huruf (AMH). Dari hasil regresi menggunakan *Fixed Effect*, nilai R^2 sebesar 0.987330, artinya bahwa variable dependen POV dapat dijelaskan oleh variable-variabel independen UMK, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), jumlah penduduk, dan jumlah Angka Melek Huruf (AMH) sebesar 98,7 % dan sisanya sebesar 1,3 % dapat dijelaskan oleh variable lain di luar model.

4.2.2.2 Pengujian Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji signifikansi parameter individual (uji t) digunakan untuk mengetahui signifikan atau tidak signifikannya variable independen terhadap variable dependen. Adapun hasil uji-t dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. Pengujian terhadap Upah Minimum

- a. $H_0 : \beta_i \geq 0$, berarti tidak ada pengaruh signifikan dari variabel upah minimum terhadap variabel tingkat kemiskinan.
- b. $H_1 : \beta_i < 0$, berarti ada pengaruh signifikan dari variabel upah minimum terhadap variabel tingkat kemiskinan.

Berdasarkan model estimasi *fixed effect* pada Tabel 4.7, dengan tingkat taraf signifikan 5 % ($\alpha = 5\%$) diperoleh hasil probabilitas variabel upah minimum sebesar 0.0000 (Prob. $< \alpha$), yang berarti H_0 ditolak dan menerima H_1 , menunjukkan bahwa variabel Upah Minimum berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan (POV) di Provinsi Jawa Tengah.

2. Pengujian terhadap tingkat pengangguran

- a. $H_0 : \beta_i \leq 0$, berarti tidak ada pengaruh signifikan dari variabel tingkat pengangguran terhadap variabel tingkat kemiskinan.
- b. $H_1 : \beta_i > 0$, berarti ada pengaruh signifikan dari variabel tingkat pengangguran terhadap variabel tingkat kemiskinan.

Berdasarkan model estimasi *fixed effect* pada Tabel 4.7, dengan tingkat taraf signifikan 5 % ($\alpha = 5\%$) diperoleh hasil probabilitas variabel tingkat pengangguran sebesar 0.0131 (Prob. $< \alpha$) yang berarti H_0 ditolak dan menerima H_1 , menunjukkan bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan (POV) di Provinsi Jawa Tengah.

3. Pengujian terhadap jumlah penduduk (JP)
 - a. $H_0 : \beta_i \geq 0$, berarti tidak ada pengaruh signifikan dari variabel jumlah penduduk terhadap variabel tingkat kemiskinan.
 - b. $H_1 : \beta_i < 0$, berarti ada pengaruh signifikan dari variabel jumlah penduduk terhadap variabel tingkat kemiskinan.

Berdasarkan model estimasi *fixed effect* pada Tabel 4.7, dengan tingkat taraf signifikan 5 % ($\alpha = 5\%$) diperoleh hasil probabilitas variabel jumlah penduduk sebesar 0.4785 ($\text{prob.} > \alpha$), yang berarti H_0 diterima dan menolak H_1 , menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan (POV) di Provinsi Jawa Tengah.

4. Pengujian terhadap Angka Melek Huruf
 - a. $H_0 : \beta_i \geq 0$, berarti tidak ada pengaruh signifikan dari variabel angka melek huruf terhadap variabel tingkat kemiskinan.
 - b. $H_1 : \beta_i < 0$, berarti ada pengaruh signifikan dari variabel angka melek huruf terhadap variabel tingkat kemiskinan.

Berdasarkan model estimasi *fixed effect* pada Tabel 4.7, dengan tingkat taraf signifikan 5 % ($\alpha = 5\%$) diperoleh hasil probabilitas variabel angka melek huruf sebesar 0.0253 ($\text{Prob.} < \alpha$) yang berarti H_0 ditolak dan menerima H_1 , menunjukkan bahwa variabel angka melek huruf mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan (POV) di Provinsi Jawa Tengah.

4.2.2.3 Pengujian Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variable-variabel independen bersama-sama mempengaruhi variable dependen atau tidak.

F-hitung dalam perhitungan menggunakan Eviews sebesar 278,8873 dengan probabilitas sebesar 0.0000 (kurang dari $\alpha = 5\%$), sehingga dapat disimpulkan bahwa secara estimasi *Fixed Effect*, variable-variabel independen seperti UMK, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), jumlah penduduk, dan Angka Melek Huruf (AMH) bersama-sama signifikan mempengaruhi variable dependen POV (tingkat kemiskinan)

4.2.3 Interpretasi Hasil dan Pembahasan

4.2.3.1 Analisis Pengaruh Upah Minimum terhadap Persentase Penduduk Miskin

Dilihat dari model estimasi *Fixed Effect* pada Tabel 4.7, diketahui bahwa variable upah minimum (UMK) mempunyai pengaruh signifikan dan memiliki korelasi yang negative terhadap tingkat kemiskinan antar Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Koefisien UMK diperoleh sebesar -3.913310, artinya apabila upah minimum meningkat sebesar 1%, maka jumlah penduduk miskin akan berkurang sebesar 3.913310%. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis bahwa UMK mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Sama dengan penelitian Riva .dkk (2014), dalam penelitiannya variabel upah minimum mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan hal ini dikarenakan bahwa penetapan upah minimum mempengaruhi

pendapatan yang diterima oleh pekerja sehingga akan menurunkan angka kemiskinan. Ketika upah minimum mengalami kenaikan maka akan memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan yang diterima masyarakat sehingga akan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan dasar, yang nantinya akan berdampak pada peningkatan produktivitas dan akan mendorong terjadinya penurunan tingkat kemiskinan

Yanthi dan Marhaeni (2015) menyebutkan bahwa kesejahteraan buruh/pekerja disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan buruh/pekerja sehingga tingkat kesejahteraan buruh/pekerja tersebut meningkat, Kenaikan upah akan menguntungkan pihak buruh/pekerja dan pengusaha karena adanya produktivitas kerja yang meningkat dan pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

4.2.3.2 Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Persentase Penduduk Miskin

Dilihat dari model estimasi *Fixed Effect* Pada Tabel 4.7, diketahui bahwa variable Tingkat Pengangguran (TPT) mempunyai pengaruh signifikan dan memiliki korelasi yang positif terhadap tingkat kemiskinan antar Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Koefisien tingkat pengangguran diperoleh sebesar 0.105795, artinya apabila tingkat pengangguran naik sebesar 1%, maka jumlah penduduk miskin akan bertambah sebesar 0.105795%. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis bahwa tingkat pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah .

Sama dengan penelitian Wardani (2013) dalam penelitiannya tingkat pengangguran mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Adanya pengangguran yang semakin tinggi akan menyebabkan penurunan pendapatan yang diterima masyarakat yang nantinya berpengaruh terhadap daya beli masyarakat sehingga secara otomatis akan menurunkan tingkat konsumsi, penurunan tingkat konsumsi ini dapat berdampak pada penurunan produktivitas masyarakat yang nantinya akan menyebabkan peningkatan tingkat kemiskinan.

Sukirno (2004) mengemukakan bahwa salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatannya. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat diwujudkan. Adanya pengangguran akan mengurangi pendapatan masyarakat, dan ini akan mengurangi tingkat kemakmuran. Atau dengan kata lain akan meningkatkan kemiskinan.

4.2.3.3 Analisis Pengaruh Angka Melek Huruf terhadap Persentase Penduduk Miskin

Dilihat dari model estimasi *Fixed Effect* Pada Tabel 4.7, diketahui bahwa variabel Angka Melek Huruf (AMH) mempunyai pengaruh signifikan dan memiliki korelasi yang negative terhadap kemiskinan antar Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Koefisien AMH diperoleh sebesar -0.102019, artinya apabila Angka Melek Huruf meningkat sebesar 1%, maka jumlah penduduk miskin akan berkurang sebesar 0.102019 %. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis

bahwa Angka Melek Huruf memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah .

Sama dengan penelitian Dores (2014), bahwa angka melek huruf mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan mempunyai peran penting dalam penurunan tingkat kemiskinan. Adanya peningkatan mutu pendidikan akan meningkatkan keterampilan dan produktivitas yang nantinya berdampak pada peningkatan kesempatan kerja. Adanya peningkatan kesempatan kerja yang didukung dengan peningkatan lapangan kerja dapat menyebabkan kenaikan pendapatan yang nantinya dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Ustama (2009), mengatakan bahwa dengan pendidikan yang baik, setiap orang memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan, mempunyai pilihan untuk mendapat pekerjaan, dari menjadi lebih produktif sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Dengan demikian pendidikan dapat memutus mata rantai kemiskinan dan menghilangkan eksklusi sosial, untuk kemudian meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan kata lain akan mengurangi kemiskinan.

4.2.3.4 Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Persentase Penduduk Miskin

Berdasarkan model estimasi *Fixed Effect* pada Tabel 4.7, diketahui bahwa variable jumlah penduduk mempunyai pengaruh yang tidak signifikan dan memiliki korelasi yang negatif terhadap kemiskinan antar Kabupaten/Kota di

Provinsi Jawa Tengah. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis, ini dikarenakan pada tahun 2010 hingga tahun 2015 jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah didominasi oleh penduduk usia produktif.

Berdasarkan data profil penduduk Jawa Tengah Hasil SUPAS tahun 2015 tercatat bahwa Jawa Tengah memiliki penduduk usia muda (0-14 tahun) sebesar 25, 12 %, penduduk usia Produktif (15-60 tahun) sebesar 63, 15% dan penduduk usia 60 tahun keatas di provinsi Jawa Tengah Sebesar 11,72 %, hal ini menunjukkan bahwa persentase jumlah penduduk usia produktif pada lima tahun terakhir memiliki persentase lebih besar dari pada penduduk usia muda dan lansia, sehingga adanya komposisi penduduk produktif yang lebih tinggi dapat memberikan kontribusi pada peluang masyarakat dalam mencari pekerjaan masih terbuka lebar hal tersebut dibuktikan dengan adanya penurunan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah.

Disamping itu adanya peningkatan penduduk yang disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Jawa Tengah juga akan menurunkan tingkat kemiskinan, adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia sering dikaitkan dengan tercapainya fungsi pendidikan, sehingga dengan adanya maksimalisasi fungsi pendidikan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan sumber daya manusia yang produktif, terdidik dan terampil. Dengan adanya peningkatan fungsi pendidikan akan membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya yang nantinya berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini

dibuktikan dengan adanya peningkatan angka melek huruf di Provinsi Jawa Tengah pada lima tahun terakhir (tahun 2011-2015).

